

Febriyana Susanti. *et al.*, *Antara Idealisme dan Kenyataan: Kebijakan Pendidikan Tionghoa Peranakan Tahun 1942-1945* ”

**ANTARA IDEALISME DAN KENYATAAN:
KEBIJAKAN PENDIDIKAN TIONGHOA PERANAKAN DI SURABAYA PADA
MASA PENDUDUKAN JEPANG TAHUN 1942-1945**

Between Idealism and Reality:

Education Policy of Chinese in Surabaya in the Japanese Era at 1942-1945)

Febriyana Susanti, Retno Winarni
Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember
Jl. Jawa VIII no 71, Jember 68121
Email: chen_max@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kebijakan pendidikan Tionghoa peranakan pada masa pendudukan Jepang di Surabaya. Tulisan ini fokus mengkaji tentang politik pendidikan pendudukan Jepang merubah kebijakan pendidikan konkordansi dan dualisme bentukan Belanda menjadi lebih terbuka untuk semua golongan. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode Louis Gottschalk yaitu menggunakan kemampuan mengadaptasikan proses agar tercipta penulisan yang obyektif yaitu dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, historiografi. Namun kebijakan pendidikan ini, tidak berlaku bagi golongan Tionghoa peranakan di Surabaya yang status kewarganegaraannya masuk dalam golongan asing. Anak-anak Tionghoa peranakan diwajibkan memasuki sekolah-sekolah Tionghoa yang dikelola organisasi *Hua Chiao Chung Hui* (HCCH) atau Federasi Orang Tionghoa peranakan bentukan pendudukan Jepang dengan bahasa pengantar Bahasa Mandarin. Secara umum kebijakan ini menimbulkan proses *resinification* (penyadaran dan penegasan kembali identitas sebagai keturunan bangsa Tionghoa), namun hal ini justru kurang begitu terasa di Surabaya yang menjadi basis kaum Tionghoa peranakan. Pengenalan adat istiadat dan kebudayaan Tionghoa bahkan menjadikan mereka terasing dengan tanah kelahirannya.

Kata kunci: politik, militer, pendidikan, Tionghoa peranakan, identitas.

Abstract

This article discusses about mixed-Chinese educational policy of of Japanese, colonial in Surabaya. This research focus examines Japanese educational policy and duteh dualism to be more opened for all ethnics. The method of this research is Louis Gotshalk method, this method uses the ability to adapt process. So that it can create objective writing, namely : heuristics, sources criticism, interpretation, and historiography. The policy above is not conducted by mixed-Chinese in Surabaya which has citizenship status as forcigner, mixed-Chinese children must enter Chinese schools that is organized by Hua Chiao Chung Hui (HCCH) oragnisation or mixed-chinese federation. In this organization, they have to use mandarin. In general, this policy causes signification process (The awareness and confirmation of Chinese generation identity) however, this is not felt in Surabaya whiech is the basis of mixed-chinese etnich. The introduction of Chinese custum and culture makes them isolated with their nomeland.

Keywords : Politic, military, education, Mixed-Chinese, identity.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan media transformasi ilmu pengetahuan maupun keterampilan bagi tiap manusia. Pendidikan ternyata juga menjadi media transformasi gaya hidup dan budaya khususnya model pendidikan yang berbasis etnisitas. Keberadaan pendidikan berbasis

etnisitas dijumpai di Indonesia sejak masa lampau. Salah satunya adalah sekolah-sekolah modern berbahasa pengantar bahasa Tionghoa yang mulai berdiri pada awal

abad ke-20 di Indonesia. Sekolah berbasis budaya etnis Tionghoa ini mula-mula didirikan atas prakarsa orang-orang Tionghoa terkemuka yang tergabung dalam *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) yaitu perkumpulan etnis

Febriyana Susanti. *et al.*, *Antara Idealisme dan Kenyataan: Kebijakan Pendidikan Tionghoa Peranakan Tahun 1942-1945*

Tionghoa di Hindia Belanda yang berdiri tahun 1900. THHK merupakan organisasi pelopor gerakan kesadaran identitas yang menggunakan istilah "Tionghoa" untuk menyebut etnis "Tjina" atau China. (Benny, 2002 : 670-673)

Setahun kemudian yakni tahun 1901 sekolah Tionghoa pertama yaitu Pa Hoa didirikan di Batavia. Sekolah berbasis etnisitas ini menjadi salah satu pilar untuk menjaga identitas ke-Tionghoan. Tujuannya mawadahi kebutuhan anak-anak Tionghoa akan pendidikan yang bermuatan budaya negeri leluhurnya yang di sisi lain juga merupakan bentuk reaksi kaum Tionghoa terpelajar terhadap kebijakan pemerintah Kolonial Belanda yang selain tak acuh terhadap pendidikan etnis Tionghoa namun juga menerapkan segregasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Hindia Belanda. Di samping itu, sekolah tersebut juga dimaksudkan sebagai media transformasi budaya agar identitas ke-Tionghoan kaum Tionghoa Hindia Belanda yang kala itu dianggap mulai meluntur dapat dibangkitkan kembali sekaligus mengobarkan nasionalisme terhadap negeri leluhur dan sekaligus sebagai media memperbaiki rendahnya mutu sekolah-sekolah Tionghoa tradisional waktu itu. (Suryadinata, 1984 : 57) Sekolah-sekolah serupa bermunculan di berbagai kota di Jawa dan luar Jawa dalam beberapa tahun setelahnya. Salah satunya berdiri di Surabaya di Jalan Kapasan pada tahun 1902 sebagai media transformasi budaya leluhur terhadap generasi muda Tionghoa di Hindia Belanda. Dalam beberapa tahun kemudian sekolah-sekolah serupa berdiri pula di beberapa kota baik di Jawa maupun di luar Jawa, di bawah koordinasi THHK di masing-masing kota. Perkembangan pesat THHK sebagai organisasi yang menaungi pendidikan Tionghoa peranakan tersebut sangat mengkhawatirkan pemerintah Hindia Belanda, sehingga untuk membendung rasa kesatuan di antara mereka pemerintah dengan terpaksa membuka sekolah yang khusus diperuntukan bagi anak-anak Tionghoa, yaitu *Hollandsch-Chineesche School* (HCS). Lembaga pendidikan formal ini dibuka di berbagai kota-kota besar, termasuk di Surabaya. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan bagi anak-anak Tionghoa peranakan untuk mendapat pendidikan formal dengan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. (Nasution, 1995 : 32)

Tionghoa peranakan merupakan salah satu suku bangsa imigran dari dataran Tiongkok yang bermigrasi sejak pertengahan abad ke 19 yang kemudian berdomisili di wilayah Indonesia dan sangat menonjol karena kegiatan mereka dalam bidang ekonomi sebagai pedagang perantara. Mereka merupakan keturunan campuran dari ayah Tionghoa peranakan dan ibu pribumi. Ada banyak kepustakaan yang membicarakan kondisi sosial ekonomi etnis Tionghoa peranakan. Berdasarkan perspektif sosial-politik, para sarjana membedakan antara istilah 'Tionghoa peranakan' dengan istilah 'Cina' dan istilah 'Tionghoa Peranakan' dengan istilah 'Tionghoa Totok.' G. William

Skinner, Leo Suryadinata, Charles A. Coppel dan Yusu Liem, memberikan penjelasan dengan makna yang hampir sama dengan mengajukan sebuah definisi mengenai orang Tionghoa peranakan yang didasarkan pada identifikasi sosial-politik. Menurut Skinner, di Indonesia seorang Tionghoa dikatakan seorang keturunan Tionghoa 'totok' apabila ia berfungsi sebagai anggota dari, dan bergabung dengan masyarakat Tionghoa. Satu-satunya tanda kebudayaan yang dapat dipercaya dari pernyataan diri sebagai orang Tionghoa dan penyatuan diri ke dalam sistem sosial Tionghoa adalah pemakaian, setidaknya dalam beberapa bentuk dan keadaan, nama keluarga Tionghoa. (Coppel, 1994 : 24)

Coppel dan Suryadinata membedakan antara Tionghoa Totok dengan Tionghoa Peranakan. Seorang Tionghoa dikatakan 'totok' apabila ia dilahirkan di Tiongkok dan dalam orientasinya lebih condong ke daratan Tiongkok. Golongan ini lebih banyak datang ke Indonesia sebagai imigran sebelum abad ke-20. Sedangkan seorang dikatakan Tionghoa 'Peranakan' jika mereka dilahirkan di Indonesia dan berasal dari keturunan campuran dengan penduduk pribumi setempat serta lebih berorientasi ke Indonesia. Suryadinata sendiri memberikan alasan bahwa penggunaan istilah 'Tionghoa peranakan' dan istilah 'Cina' berdasarkan pengaruh politik. (Coppel, *Ibid.*, 1994 : 26; 32) Sementara Van der Kroef dan Mary Somers Heidhues mengatakan bahwa sejak jaman kolonial Belanda, istilah 'Cina' berubah fungsi dan mengandung arti yang merendahkan, dan dianggap oleh yang bersangkutan sebagai sebutan yang bersifat menghina dan meremehkan, sedang Gordon Allport mengatakan bahwa hakekat prasangka adalah memanggil orang dengan nama yang tidak senonoh (*name-calling*) merupakan pencerminan prasangka, sejenis penolakan lisan. (Suryadinata, 1984 : 99.) Yusu Liem justru berpendapat sebaliknya. Menurutnya, penggunaan istilah 'Cina' berubah fungsi karena adanya kebiasaan masyarakat dalam pemanggilan dan bermetaformosis dari konotasi negatif menjadi konotasi positif, sama seperti penggunaan kata-kata 'afro', 'negro' atau 'black' yang bermetaformosis menjadi kata perjuangan bagi kaum minoritas Negro yang dulu disebut kaum 'nigger' atau 'black' di Amerika Serikat. (Yusu Liem, 1988 : xxix-xxx) Sementara penggunaan istilah 'Tionghoa peranakan' untuk pertama kali di Indonesia ditemui dalam nama perkumpulan yang didirikan tahun 1900, yaitu HHK. Melalui THHK dan sekolah-sekolahnya, serta penyebaran pemakaian istilah Tionghoa peranakan dalam pers Peranakan, kaum Peranakan Tionghoa mulai terbiasa mendengar istilah baru itu. (Yusu Liem, 1988: 104-105) Dalam penulisan skripsi ini penulis lebih condong menggunakan nama Tionghoa peranakan untuk mengidentifikasi etnis Tionghoa didasarkan pada umumnya penggunaan istilah tersebut pada masa pemerintah pendudukan Jepang. Dengan demikian tulisan ini bermaksud ingin mendeskripsikan kebijakan (aturan) pendidikan pemerintah pendudukan Jepang terhadap etnis

Febriyana Susanti. *et al.*, *Antara Idealisme dan Kenyataan: Kebijakan Pendidikan Tionghoa Peranakan Tahun 1942-1945*

Tionghoa peranakan di Surabaya tahun 1942-1945. Permasalahan yang ditetapkan dalam artikel ini adalah: 1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi perubahan dalam kebijakan pendidikan etnis Tionghoa peranakan di Surabaya masa pemerintah pendudukan Jepang? 2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan Tionghoa peranakan masa pemerintah Pendudukan Jepang? 3. Bagaimana reaksi etnis Tionghoa peranakan terhadap kebijakan pendidikan pemerintah pendudukan Jepang? Sementara tujuan penelitian ini adalah untuk (1) melacak faktor-faktor yang mendorong pemberlakuan kebijakan pendidikan Tionghoa peranakan di Surabaya; (2) untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan Tionghoa peranakan di Surabaya pada masa pemerintah pendudukan Jepang; (3) untuk menjelaskan bagaimana reaksi etnis Tionghoa peranakan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang meliputi empat tahap yaitu; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. (Louis Gotschalk, terj. Nugroho Notosusanto, 1982 : 18) Heuristik adalah usaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. Sumber sejarah tersebut berasal dari sumber primer maupun sumber sekunder. (Louis Gotschalk, *ibid.*, : 19) Sumber primer adalah sumber yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap peristiwa, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari orang ketiga, buku-buku, literatur, koran dan majalah, atau tulisan-tulisan yang semasa dengan peristiwa yang dikaji. Adapun sumber sejarah yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari dua macam, yaitu: Sumber primer, terdiri dari dua macam kategori, antara lain berupa arsip dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan langsung dengan obyek penulisan, seperti tulisan para pelaku sejarah. Sumber sekunder, diperoleh dari buku-buku tentang etnis Tionghoa peranakan yang ada di perpustakaan dan toko-toko buku yang tentunya isinya sudah mengalami banyak interpretasi dari masing-masing penulis.

Tahap kedua yang penulis lakukan mengkritisi sumber untuk mendapatkan data yang otentik dan kredibel (Ibrahim Alfian, 1985 : 7) Tahap selanjutnya (tahap ketiga) yang dilakukan adalah interpretasi, dengan menggunakan ilmu bantu dan teori sebagai alat analisis guna memperoleh pengertian dan pemahaman terhadap obyek penulisan sejarah yang dikaji. Proses penafsiran sumber-sumber sejarah dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang sudah disepakati bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang meliputi: "apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan mengapa." Hasil interpretasi kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan (tahap historiografi) dengan menggunakan bahasa Indonesia ragam baku ilmiah, sehingga diperoleh bentuk penulisan sejarah yang deskriptif-analitis. Deskriptif analitis yang dimaksud di sini adalah penulisan yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu yang disertai dengan analisis kritis, mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi

tidak melakukan pengujian hipotesa. (Singarimbun, 1983 : 4)

2. Politik Pendidikan Masa Pemerintahan Jepang

Pembicaraan tentang pendidikan kaum Tionghoa peranakan, tidak akan luput dari permasalahan politik pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah pendudukan Jepang di Surabaya. Kebijakan pendidikan pemerintah pendudukan Jepang diarahkan pada kepentingan militer Jepang dalam menghadapi Sekutu di Perang Pasifik. Pemerintah Pendudukan Jepang, sejak menguasai tanah jajahan pada bulan Maret 1942, menutup berbagai lembaga pendidikan Belanda, dan melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Lembaga pendidikan Belanda yang harus ditutup adalah *Holland Chinezen Scholen* (HCS). Akibatnya, banyak generasi muda Tionghoa peranakan terpaksa memasuki ke sekolah-sekolah dengan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantarnya yang dikelola oleh organisasi *Hua Chiao Chung Hui* (HCCH) atau Federasi Orang Tionghoa Perantauan bentukan pemerintah pendudukan Jepang.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2 bahwa dengan munculnya pan Tionghoa pada awal abad ke-20, gerakan-gerakan kesadaran akan identitas di kalangan etnis Tionghoa peranakan mulai bermunculan. Hal ini dimulai dengan pembentukan Tionghoa Hwee Koan (THHK) pada tahun 1900 yang mula-mula berorientasi pada keagamaan di kalangan Tionghoa peranakan, dan kemudian mendapat pengaruh dari generasi muda Tionghoa peranakan yang mendapat pendidikan gaya barat serta kaum nasionalis dari daratan Tiongkok yang melarikan diri ke Singapura, THHK menjadi sponsor bagi gerakan nasionalis Tionghoa peranakan di Indonesia. (Suryadinata, 1984 : 83)

Upaya untuk mewujudkan kesadaran identitas bagi generasi mudanya, THHK mendirikan sekolah-sekolah swasta dengan bahasa pengantar Bahasa Mandarin. Para guru dan pengawas pendidikan didatangkan dari daratan Tiongkok. Sekolah THHK ini dengan cepat mendapat sambutan hangat dari komunitas Tionghoa peranakan di Indonesia, termasuk di Surabaya. Melihat perkembangan tersebut pemerintah kolonial Hindia Belanda membuka sekolah baru, yaitu *Holland Chinezen Scholen* (HCS) bagi etnis Tionghoa peranakan dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda. (Suryadinata, 1984 : 85) Sekolah THHK dan sekolah HCS secara tidak langsung memecah belah komunitas Tionghoa peranakan antara yang pro negara Tiongkok dengan yang pro pemerintah kolonial Hindia Belanda. Perpecahan di kalangan Tionghoa peranakan terus berlanjut hingga memunculkan tiga aliran politik yang mempunyai orientasi sendiri-sendiri. Aliran pertama adalah kelompok yang menamakan dirinya sebagai *Sin Po* yang menghendaki agar orang Tionghoa peranakan di Indonesia mempertahankan kebangsaan Tionghoa peranakannya dan berusaha menarik golongan peranakan lebih dekat ke Tiongkok dengan membuat mereka lebih menyerupai golongan totok. Kelompok ini menganjurkan

Febriyana Susanti. *et al.*, *Antara Idealisme dan Kenyataan: Kebijakan Pendidikan Tionghoa Peranakan ” Tahun 1942-1945*

agar Tiongkok dianggap sebagai tanah air orang Tionghoa peranakan di Indonesia dan orang Tionghoa peranakan harus menempatkan nasibnya di tangan Tiongkok. Kelompok ini berpusat di Batavia. Aliran kedua adalah kelompok yang diwakili oleh *Chung Hwa Hui* (CHH) yang menghendaki orang Tionghoa peranakan tetap mempertahankan identitas etnisnya di lingkungan Indonesia dan memperjuangkan kebudayaan Tionghoa. Kelompok ini kebanyakan dimotori oleh anak-anak saudagar kaya dan opsir Tionghoa peranakan yang mendapat didikan sekolah-sekolah barat, sehingga lebih berorientasi dan bekerjasama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kelompok ini terpusat di Semarang. Aliran ketiga diwakili oleh kelompok *Partai Tionghoa Indonesia* (PTI) yang menginginkan orang Tionghoa peranakan Indonesia tetap mempertahankan etnisnya, tetapi secara politik terasimilasi ke dalam masyarakat pribumi. Mereka menganggap Indonesia sebagai tanah airnya dan menamakan dirinya sebagai *Indonesier* (orang Indonesia), menuntut persamaan hak dan kewajiban dengan orang pribumi, mau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, dan percaya bahwa nasib mereka terikat dengan nasib orang pribumi. Kelompok ini terpusat di Surabaya dan mempunyai hubungan yang cukup akrab dengan kaum nasionalis pribumi dan keturunan Arab (Suryadinata,

1994 : 87-90.)

Setelah pemerintah pendudukan Jepang menguasai Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang melarang semua aktivitas politik etnis Tionghoa peranakan. Memang di kalangan Tionghoa peranakan terdapat sentiment anti Jepang yang disebabkan oleh invasi militer Jepang ke daratan Tiongkok pada tahun 1930-1937. (Murniawati, 2010 : 2-3)

Usaha mengatasi meluasnya sentiment anti Jepang, pemerintah pendudukan Jepang membentuk lembaga *Kakyo Han* dengan cara menyusupkan mata-mata dalam kalangan etnis Tionghoa peranakan. Pemerintah pendudukan Jepang selain itu juga mengadakan penangkapan terhadap aktivis Tionghoa peranakan yang dianggap membahayakan stabilitas pemerintah pendudukan Jepang. Penangkapan juga dilakukan kepada semua tokoh pergerakan THHK. Penangkapan- penangkapan tersebut dilakukan serentak di seluruh pulau Jawa. Mereka yang tertangkap kemudian dikumpulkan menjadi satu dengan orang-orang Belanda di kamp konsentrasi Cimahi, Jawa Barat (Beng Kok, 2009 : 155) atau di penjara Bukit Duri Serang (Joe Lan, 2008 : 125- 150) dan sebagian lainnya bersembunyi serta melakukan gerakan bawah tanah. (G. Setiono, 2002 : 357)

Sementara itu, etnis Tionghoa peranakan yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang kebanyakan berada di bawah naungan kelompok *Hua Chiao Chung Hui* (HCCH) atau Federasi Orang Tionghoa Perantauan yang dibentuk pemerintah

pendudukan Jepang sebagai wadah kaum Tionghoa peranakan. HCCH merupakan organisasi bentukan pemerintah pendudukan Jepang yang dibuat untuk mewadahi dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kaum Tionghoa peranakan. Organisasi ini merupakan satu-satunya organisasi yang diperbolehkan hidup pada masa pemerintah pendudukan Jepang. Organisasi ini dipimpin oleh orang Tionghoa peranakan, di mana surat kabat *Hong Po* menjadi alat untuk menyuarakan kebijakan pemerintah, sehingga surat kabar ini dinilai pro Jepang. Surat kabar ini dipimpin oleh Oey Tiang Tjoei (Poerwanto, 2005 : 64). Somers Heidhues menilai bahwa selama pemerintah pendudukan Jepang, perkembangan politik orang Tionghoa peranakan praktis mengalami kekosongan, sebab sebagian pemimpin Tionghoa peranakan ditahan dan mereka terisolasi dari perkembangan masyarakat Hindia Belanda. (Somers Heidhues, 1991 : 159.)

Pemerintah pendudukan Jepang memberlakukan kebijakan dalam bidang pendidikan yang kurikulumnya ditujukan untuk keperluan perang Asia Timur Raya. Sistem dualisme dan konkordansi yang pernah diterapkan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dihapus dan pendidikan sangat terbuka bagi semua anak-anak pribumi, sehingga semua siswa mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan (Legge, 1993 : 32), namun demikian, kebijakan pendidikan pemerintah pendudukan Jepang terbuka untuk umum, namun bagi anak-anak Tionghoa peranakan tidak dapat memasukinya. Alasan utama untuk memberikan pendidikan khusus bagi anak-anak Tionghoa peranakan adalah untuk lebih memudahkan pengawasan terhadap etnis Tionghoa peranakan. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran pemerintah pendudukan Jepang terhadap sentiment anti Jepang yang masih kental dalam kalangan Tionghoa peranakan, juga pengalaman masa lalu, di mana pada masa invasi militer Jepang ke Tiongkok tahun 1930-1937, banyak tokoh-tokoh Tionghoa peranakan yang melakukan kampanye penggalangan dana kemanusiaan bagi masyarakat Tiongkok serta penghujatan invasi militer Jepang ke Tiongkok. Akibatnya ketika pemerintah pendudukan Jepang menguasai Indonesia, kaum Tionghoa peranakan dianggap sebagai bangsa asing yang menumpang hidup di tanah Indonesia. Anggapan sebagai bangsa asing inilah yang menjadikan pemerintah pendudukan Jepang memberikan sekolah khusus untuk anak-anak Tionghoa peranakan. Sekolah- sekolah untuk anak-anak Tionghoa peranakan ini dikelola oleh organisasi HCCH dibawah pengawasan pemerintah pendudukan Jepang. Pendidikan bagi anak-anak Tionghoa peranakan ini diselenggarakan dengan menggunakan bahasa pengantar Bahasa Mandarin.

Politik pendidikan kaum Tionghoa peranakan dengan sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak Tionghoa peranakan dan Bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantarnya sebenarnya tidak luput dari aturan kebijakan Pemerintah pendudukan Jepang mengenai kedudukan

Febriyana Susanti. *et al.*, *Antara Idealisme dan Kenyataan: Kebijakan Pendidikan Tionghoa Peranakan Tahun 1942-1945*

kaum Tionghoa peranakan dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tanggal 11 April 1942, pemerintah pendudukan Jepang menggolongkan kaum Tionghoa peranakan sebagai bangsa asing. Akibat kebijakan ini kaum Tionghoa peranakan diwajibkan mendaftarkan kembali identitasnya dan memenuhi kewajiban yang dibebankan pada statusnya sebagai bangsa asing. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah membayar pajak. Orang Tionghoa peranakan secara keseluruhan diharuskan membayar pajak bangsa asing, untuk laki-laki f 100 dan perempuan f 50. Sistem *passenstelsel* (surat jalan) yang pernah diterapkan masa kolonial Belanda dipakai kembali. Dengan demikian, kemanapun kaum Tionghoa peranakan dewasa bepergian, mereka diharuskan membawa kartu pengenalan asing dan surat jalan (Kwartanada, 1996 : 31)

Penggolongan status kaum Tionghoa peranakan sebagai bangsa asing ini menjadikan anak-anak mereka harus masuk dalam lembaga pendidikan yang khusus bagi kaum Tionghoa peranakan. Kurikulum yang diajarkan pun lebih banyak mengenalkan kembali kebudayaan dan adat istiadat leluhur mereka. Hal inilah yang membuat kaum Tionghoa peranakan menjadi dilema di antara tanah kelahirannya dengan status kebangsaannya. Pada satu sisi, mereka merupakan keturunan yang mempunyai darah pribumi dari garis ibu sehingga dapat dikatakan separoh, dan di sisi lain mereka diperlakukan dengan status sebagai bangsa asing yang berbeda dengan kaum pribumi.

Penggunaan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar dalam sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak Tionghoa peranakan bentukan pemerintah pendudukan Jepang ini secara tidak langsung membawa dampak tersendiri bagi mereka. Pada satu sisi, penggunaan bahasa Mandarin secara tidak langsung mengimplikasikan adanya proses *resinification* (penyadaran dan penegasan identitas sebagai keturunan bangsa Tionghoa peranakan) yang pada masa kolonial Belanda pernah hidup. Penyadaran dan penegasan kembali identitas ke-Tionghoan ini membawa dampak besar bagi anak-anak Tionghoa peranakan yang semakin terasing dengan lingkungan sosial tempat tinggal mereka (Suryadinata, 1984 : 89)

Kebalikannya di daerah Surabaya penggunaan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar dalam sekolah-sekolah Tionghoa peranakan bentukan pemerintah pendudukan Jepang bagi anak-anak Tionghoa peranakan justru merasa asing dengan adat istiadat dan kebudayaan leluhur mereka. Surabaya merupakan pusat dari aliran politik yang pro terhadap nasionalis pribumi. Kaum Tionghoa peranakan mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari pribumi, sehingga dalam masalah pendidikan mereka lebih banyak diajarkan budaya-budaya di mana mereka bertempat tinggal. Hal inilah yang menjadikan anak-anak Tionghoa peranakan merasa terasing dengan pelajaran yang diterima di sekolah bentukan pemerintah pendudukan Jepang.

Kedatangan kaum Tionghoa dari daratan Tiongkok pertama kali ke Surabaya pada abad 17, mereka sudah melakukan hubungan dengan kaum pribumi. Hubungan ini kemudian berlanjut sampai pada perkawinan dengan wanita pribumi dan membuka lahan pembukaan pemukiman baru di daerah pinggir aliran sungai Kalimas. Kasus ini terjadi pada keluarga Tjoa yang pertama kali datang ke Surabaya pada tahun 1753 dan kemudian menikah dengan saudara perempuan Bupati Surabaya. (Dukut, 2002 : 271) Keturunan keluarga Tjoa ini secara tidak langsung menurunkan darah pribumi dari garis ibu, dan ini menjadikan mereka semakin dekat dengan kaum pribumi. (Beng Kok, 2009 : 152) Jalanan hubungan kedekatan antara Tionghoa peranakan dengan kaum pribumi ini berlangsung hingga awal abad ke-20. Ketika terjadi gerakan nasionalisme kaum Tionghoa peranakan, daerah Surabaya juga tidak luput dari imbas gerakan nasionalisme tersebut. Namun, pengaruh gerakan nasionalisme di daerah Surabaya tidak begitu besar, karena kebanyakan kaum Tionghoa peranakan daerah ini merupakan keturunan campuran antara bapak Tionghoa peranakan dengan ibu pribumi. Dengan demikian terdapat kedekatan emosional antara orang Tionghoa peranakan dengan kaum pribumi yang sudah dianggap sebagai saudaranya. (Suryadinata, 1984 : 90)

Adanya sekolah khusus untuk anak-anak Tionghoa peranakan bentukan pemerintah pendudukan Jepang di Surabaya dengan kebijakan yang mengharuskan anak-anak Tionghoa peranakan mengenali kembali kebudayaan leluhur mereka inilah yang menjadikan kaum Tionghoa peranakan Surabaya merasa terasing dengan tanah kelahirannya. Penggunaan Bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar dalam kurikulum sekolah bentukan Jepang bagi anak-anak Tionghoa peranakan juga membawa kesulitan tersendiri bagi anak-anak Tionghoa peranakan yang sudah luntur dalam akar kebudayaan ke-Tionghoannya. (Kwartanada, 1996 : 64) Seperti yang telah diketahui, sejak kaum Tionghoa peranakan berdiam di Surabaya, banyak dialek leluhur mereka terkikis seiring dengan perkembangan jaman. Hal ini secara tidak langsung semakin minimnya kaum Tionghoa peranakan yang menguasai bahasa leluhurnya. Demikian juga dalam bahasa pendidikan kaum Tionghoa peranakan di Surabaya sering menggunakan bahasa Melayu lokal. Bahasa ini pada awalnya merupakan perkembangan dari bahasa perdagangan yang dijadikan alat komunikasi antara kaum pribumi dengan kaum Tionghoa peranakan. Lama kelamaan bahasa ini menjadi bahasa komunikasi kaum Tionghoa peranakan dalam berbagai hal. Bahasa Melayu lokal yang dipakai oleh kaum Tionghoa peranakan sebagai alat komunikasi ini kemudian menjadi bahasa pengantar dalam sekolah-sekolah yang didirikan oleh kaum Tionghoa peranakan di Surabaya. Hal inilah yang menjadikan bahasa leluhur mereka semakin lama semakin menipis dan kurang dikenal pada abad ke 20. Apalagi bahasa

Febriyana Susanti. *et al.*, *Antara Idealisme dan Kenyataan: Kebijakan Pendidikan Tionghoa Peranakan Tahun 1942-1945*

Mandarin bahasa nasional daratan Tiongkok yang baru dikenal. (Oetomo, 1991 : 137-138)

Menurut Oetomo pemakaian bahasa bagi orang Tionghoa peranakan dibedakan menjadi empat dalam berkomunikasi sesuai dengan lingkungan sosialnya. *Pertama* bahasa keakraban yang digunakan dalam lingkungan keluarga dan teman dekat. Bahasa keakraban generasi pertama menggunakan dialek daerah asal masing-masing imigran Tionghoa peranakan. Di Surabaya kaum Tionghoa peranakan kebanyakan menggunakan dialek Hokkian. Namun karena hubungan kaum Tionghoa peranakan dengan pedagang pribumi mereka lebih banyak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa keakraban. *Kedua* bahasa solidaritas yang digunakan oleh kaum Tionghoa peranakan ketika berbicara dengan kaumnya tanpa mempedulikan perbedaan sub-budayanya, dan bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu. *Ketiga* bahasa untuk kalangan umum yang digunakan kaum Tionghoa peranakan ketika berkomunikasi dengan orang bukan

Tionghoa peranakan, dan bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu lokal. (Oetomo, 1991 : 131-36) *Keempat* bahasa pendidikan yang dipakai ketika kaum Tionghoa peranakan menerima pendidikan. Awal Abad ke-18 kurikulum pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Hokkian, dan pada kedua abad ke-19 semakin banyak bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di beberapa sekolah-sekolah swasta Tionghoa peranakan. Namun penggunaan bahasa Melayu mengalami kemunduran ketika gerakan nasionalisme Tionghoa peranakan melanda Pulau Jawa awal abad ke-20 dengan dibukanya sekolah-sekolah swasta dengan bahasa pengantar Bahasa Mandarin yang banyak diminati oleh kaum Tionghoa totok. Tidak lama kemudian pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah untuk kaum Tionghoa peranakan dengan Bahasa pengantar Bahasa Belanda. Akibatnya terjadi persaingan antara sekolah-sekolah Tionghoa peranakan dengan bahasa pengantar Bahasa Mandarin dengan sekolah-sekolah pemerintah dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda. Sementara itu, kaum Tionghoa peranakan yang dalam status sosial ekonomi berada dalam kalangan bawah dalam bahasa pendidikan tetap menggunakan Bahasa Melayu. (Oetomo, 1991 : 137-138)

Dengan demikian dalam prakteknya, para guru-guru Tionghoa peranakan tetap menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam menyampaikan kurikulum pelajaran yang diajarkan, meskipun dalam aturan kebijakan sekolah Tionghoa peranakan harus diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Mandarin. Hal ini disebabkan karena mayoritas anak-anak Tionghoa peranakan Surabaya sangat jarang menguasai dialek leluhur mereka dengan baik. Guna memudahkan pemahaman akan pembelajaran bagi siswa-siswa didiknya, para guru Tionghoa peranakan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. (Kwartanada, 2007 : 14) Baru dalam keadaan darurat para

guru Tionghoa peranakan menggunakan bahasa Mandarin, seperti ketika para pengawas pendidikan dari pegawai pemerintah pendudukan Jepang mendadak datang untuk meninjau.

Secara umum sistem pendidikan pada masa pemerintah pendudukan Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko/Sekolah Rakyat). Lama studi 6 tahun. Termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. (2) Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan KotoChu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun. (3) Pendidikan Kejuruan. Mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. (4) Pendidikan Tinggi. (Soemanto, Wasti dan Soeyarno 1983 : 64) Selanjutnya sekolah-sekolah yang bertipe akademis diganti dengan sekolah-sekolah yang bertipe vokasi. Jepang juga melarang pihak swasta mendirikan sekolah lanjutan dan untuk kepentingan kontrol, maka sekolah swasta harus mengajukan izin ulang untuk dapat beroperasi kembali. Jika diperhatikan kebijakan pendidikan ini menyebabkan terjadinya kemunduran yang luar biasa bagi dunia pendidikan dilihat dari aspek kelembagaan dan operasional pendidikan lainnya. Angka buta huruf menjadi sangat tinggi, walaupun telah ada usaha pemberantasan buta huruf. (Suka, 1993 : 35)

Pemerintah Pendudukan Jepang juga mencoba memformat pendidikan yang mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. Sekalipun patut dicatat bahwa pada menjelang akhir masa pendudukannya, ada indikasi kuat Jepang untuk menerapkan sistem Nipponize kembali, yakni dengan dikerahkannya *Sendenbu* (propagator Jepang) untuk menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia Raya. Jepang juga memandang perlu melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. (Nasution, 1985 : 36) Materi pokok dalam latihan tersebut antara lain: (1) Indoktrinasi ideologi Hakko Ichiu; (2) Nippon Seisyin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang; (3) Bahasa, sejarah dan adat-istiadat Jepang; (4) Ilmu bumi dengan perspektif geopolitis; serta (5) Olaharaga dan nyanyian Jepang. (Suka, 1993 : 43)

Surat kabar Djawa Baroe bahkan menjelaskan perihal kondisi sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada edisi 1 Januari 1943, surat kabar mendeskripsikan bahwa semua sekolah-sekolah diwajibkan menggunakan bahasa pengantar Indonesia dan Jepang, dan lebih jelas lagi setiap surat kabar yang terbit harus mencantumkan pelajaran bahasa Jepang pada lembar terakhir.

Febriyana Susanti. *et al.*, *Antara Idealisme dan Kenyataan: Kebijakan Pendidikan Tionghoa Peranakan ” Tahun 1942-1945*

Sementara untuk pembinaan kesiswaan, Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas berikut ini: (1) Menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo setiap pagi; (2) Mengibarkan bendera Jepang, Hinomura dan menghormati Kaisar Jepang, Tenno Heika setiap pagi; (3) setiap pagi mereka juga harus melakukan Dai Toa, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya; (4) Setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan Taiso, senam Jepang; (5) Melakukan latihan-latihan fisik dan militer; (7) Menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan.

Penyelenggaraan pendidikan masa pemerintah pendudukan Jepang sebenarnya digunakan untuk kepentingan perang dan untuk melibatkan hasil ekonomi Jepang murid-murid diharuskan membuat pupuk kompos atau ramai-ramai membasmi tikus disawah. Setiap hari murid harus mengucapkan sumpah pelajar dalam bahasa Jepang. Agar bahasa Jepang lebih populer, maka diadakan ujian bahasa Jepang. Surat kabar Djawa Baroe sering mengumumkan hasil-hasil ujian bahasa Jepang bagi siswa-siswa yang mengikutinya.

Materi pokok dalam latihan tersebut antara lain: (1) Indoktrinasi ideologi Hakko Ichiu; (2) Nippon Seisyin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang; (3) Bahasa, sejarah dan adat-istiadat Jepang; (4) Ilmu bumi dengan perspektif geopolitis; serta (5) Olah raga dan nyanyian Jepang. Sementara untuk pembinaan kesiswaan, Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas berikut ini: (1) Menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo setiap pagi; (2) Mengibarkan bendera Jepang, Hinomura dan menghormati Kaisar Jepang, Tenno Heika setiap pagi; (3) setiap pagi mereka juga harus melakukan Dai Toa, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya; (4) Setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan Taiso, senam Jepang; (5) Melakukan latihan-latihan fisik dan militer; (7) Menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan. (Soemanto, Wasti dan Soeyarno, 1983 : 43)

Pada masa pendudukan Jepang terdapat perbedaan dalam pemberian materi pelajaran. Bagi siswa-siswa putri materi pelajaran yang diberikan sangat berkaitan dunia keperempuanan, seperti pelajaran memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Program kurikulum sekolah dasar untuk anak-anak perempuan yang berisi daftar mata pelajaran dengan alokasi waktu tiap mata pelajaran per minggu yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

3. Akhir Perjuangan etnis Tionghoa Peranakan Terhadap Politik Pendidikan Masa Pemerintah

Pendudukan Jepang memasuki akhir pemerintahan pendudukan Jepang, kebijakan pemerintah lebih banyak

diarahkan kepada bantuan perang Pasifik. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam perang Pasifik sudah sangat terdesak. Sekutu yang sebelumnya bersifat defensif, mulai berubah menjadi ofensif. Taktik yang digunakan Panglima Tertinggi Sekutu di Pasifik Jenderal Douglas Mc. Arthur, mampu mendesak militer Jepang. Satu persatu beberapa wilayah pendudukan Jepang yang berada di kawasan Pasifik jatuh ke tangan Sekutu. Selain itu, kedudukan militer Jepang semakin terancam karena pihak angkatan udara Sekutu telah memasuki wilayah udara Jepang dan mulai melakukan serangan langsung dengan cara menjatuhkan bom di lokasi-lokasi strategis negara tersebut. (Benedict, 1988 : 134)

Semakin terdesaknya militer Jepang dengan dikuasainya wilayah-wilayah pemerintah pendudukan Jepang yang berada di kawasan Pasifik oleh pasukan Sekutu secara samar-samar terdengar oleh kaum Tionghoa peranakan Surabaya. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Sebagian besar kaum Tionghoa peranakan Surabaya merasa khawatir dengan munculnya kembali kekerasan terhadap kaumnya setiap terjadi peralihan kekuasaan. Pengalaman pahit yang dirasakan pada masa peralihan kekuasaan dari kolonial Belanda ke tentara pendudukan Jepang masih cukup membekas dalam benak kaum Tionghoa peranakan Surabaya. Mereka merasa was-was dengan peristiwa kekerasan terulang kembali terhadap kaum Tionghoa peranakan. Sedangkan bagi sebagian lainnya desas-desus kekalahan militer Jepang atas Sekutu disambut dengan gembira oleh kaum Tionghoa peranakan Surabaya. Tokoh-tokoh gerakan pendidikan Tionghoa peranakan semakin mempersiapkan diri mereka untuk menyambut kekalahan militer Jepang. Kondisi ini secara tidak langsung semakin menarik tokoh-tokoh pendidikan dalam pusaran politik. Dalam kondisi seperti itulah, pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso akhirnya memaklumkan janjinya di depan Parlemen Jepang mengenai rencana pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kemudian hari. (Benny G. Setiono, 2002:370)

Sesuai dengan janji Perdana Menteri Kaiso, Letnan Jendral Kumakici Harada, pada 1 Maret 1945, mengumumkan pembentukan sebuah badan, yaitu Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI bertugas menyelidiki dan mempelajari hal penting mengenai masalah tata pemerintahan atau pembentukan negara Indonesia merdeka. Pada 1 April 1945 diumumkan nama-nama anggota BPUPKI yang terdiri dari 60 orang wakil dari berbagai pribumi merupakan perwakilan Tionghoa peranakan, yaitu Liem Koen Hian, Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei, dan Tan Eng Hoa. Selain ketua, ada pula ketua muda yang terdiri dari 2 orang yaitu Ischibangase dan R.P. Suroso. Peresmian dan pelantikan pengurus BPUPKI dilaksanakan pada 28 Mei 1945. (Benny G. Setiono 2002 : 364)

Febriyana Susanti. *et al.*, *Antara Idealisme dan Kenyataan: Kebijakan Pendidikan Tionghoa Peranakan Tahun 1942-1945*

Gerakan pendidikan kaum Tionghoa peranakan yang bertujuan untuk memperbaiki politik pendidikan menjadi kendor. Para tokoh-tokohnya lebih banyak mengurus permasalahan politik dari pada permasalahan pendidikan. Desas-desus berita bahwa tentara Jepang akan mengadakan kapitulasi dengan Sekutu pada bulan Agustus tahun 1945 sebagian besar telah didengar para tokoh-tokoh gerakan kaum Tionghoa peranakan, terutama mereka yang bekerja di kantor-kantor pemerintah pendudukan Jepang, seperti Liem Koen Hian, Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei, Tan Eng Hoa dan tokoh-tokoh lainnya. Melalui siaran radio yang dimiliki oleh organisasi gerakan bawah tanah kaum Tionghoa peranakan dapat menangkap siaran luar negeri. Siaran Radio BBC London memberitakan bahwa setelah serangkaian perundingan antara pihak tentara Jepang dan Sekutu, tentara Jepang telah menyatakan kesediaannya untuk menyerah tanpa syarat, hanya tinggal menunggu diumumkankannya pernyataan menyerah oleh Kaisar Hirohito. Pengumuman pernyataan menyerah ini baru dinyatakan oleh Kaisar Hirohito pada malam tanggal 14 Agustus 1945. (Benedict, 1988 : 89).

4. KESIMPULAN

Ketika pasukan tiba di Jawa, khususnya di Surabaya pada 1942, warga Tionghoa peranakan memiliki perbedaan perlawanan atas kedatangan tentara Jepang tersebut. Sebagian ingin menunjukkan solidaritas dan patriotismenya terhadap penderitaan saudaranya di Tiongkok. Hal ini dilatarbelakangi oleh peristiwa penyerbuan tentara Jepang ke Tiongkok pada 1931. Aksi perlawanan mereka tetap berlanjut ketika Jepang benar-benar menduduki Surabaya. Mereka tetap tidak mau bekerjasama dengan Jepang. Sebagian yang lain berpendapat bahwa lebih mudah membantu melawan gerakan fasisme Jepang di tanah Jawa, daripada mengirim bantuan ke Tiongkok. Kaum Tionghoa peranakan juga tidak mengingkari adanya usaha untuk bekerjasama dengan Jepang jika memang terpaksa, dan itu dilakukan untuk mendapatkan keselamatan diri. Kepentingan pemerintah pendudukan Jepang, sehingga dapat diketahui bahwa selama pemerintah pendudukan Jepang keberadaan kaum Tionghoa peranakan tetap dibutuhkan, khususnya mengenai peran serta fungsi ekonomi yang sangat penting bagi siapapun yang berkuasa di Indonesia. Perlakuan yang khusus ini kemudian berimbas pada kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah pendudukan Jepang terhadap kaum Tionghoa peranakan. Dalam penjelasan yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan kaum Tionghoa peranakan di Surabaya tidak lepas dari sistem politik pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang.

Berkaitan dengan statusnya sebagai bangsa asing yang diperlakukan berbeda dengan kaum pribumi, membuat anak-anak Tionghoa peranakan diharuskan memasuki

lembaga-lembaga pendidikan bentukan pemerintah yang mengajarkan kembali adat istiadat dan kebudayaan leluhur mereka. Dampak langsung bagi politik pendidikan yang diterapkan pemerintah pendudukan Jepang bagi sebagian kaum Tionghoa peranakan memunculkan terjadinya proses *resinification* (penyadaran dan penegasan identitas sebagai keturunan bangsa Tionghoa) yang pada masa kolonial Belanda pernah hidup. Akan tetapi, dalam kasus wilayah Surabaya yang menjadi basis kaum Tionghoa peranakan pengenalan adat istiadat dan kebudayaan Tionghoa justru menjadikan mereka merasa asing dengan kebudayaan leluhurnya. Hal ini karena kebanyakan dari kaum Tionghoa peranakan merupakan keturunan campuran dari perkawinan antara kaum Tionghoa dari pihak ayah dengan kaum pribumi dari pihak ibu.

Pengenalan adat istiadat dalam kurikulum pendidikan Tionghoa peranakan masa pemerintah pendudukan Jepang juga mengakibatkan semakin terasingnya kaum Tionghoa peranakan dengan tanah kelahirannya. Dalam satu sisi mereka merupakan kelahiran di bumi Indonesia dan sisi lain secara kebangsaan mereka masuk dalam golongan bangsa asing. Permasalahan ini kemudian berimbas pada hubungan kaum Tionghoa peranakan dengan kaum pribumi. Namun, untuk wilayah Surabaya pengaruhnya tidak begitu besar, karena banyak di antara para tokoh-tokoh gerakan pendidikan kaum Tionghoa menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pendidikan dari kaum pribumi, seperti hubungan Liem Koen Hian dengan Tjokroaminoto. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik pendidikan yang diterapkan pemerintah pendudukan Jepang yang berimbas bagi penyadaran identitas kaum Tionghoa peranakan tidak begitu besar pengaruhnyasejak lama antara tokoh pendidikan kaum Tionghoa dengan tokoh pendidikan kaum pribumi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku
- Anderson, Benedict OR'G, *Revolusi Pemuda; Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, terj., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Arifanti Murniawati, *Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang Terhadap Etnis Cina di Malaya 1942-1945*, Skripsi tidak dipublikasikan, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010
- Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, Jakarta: Elkasa, 2002
- Coppel, Charles A. *Tionghoa dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Febriyana Susanti. *et al.*, *Antara Idealisme dan Kenyataan: Kebijakan Pendidikan Tionghoa Peranakan Tahun 1942-1945*

Dede Oetomo, "Kemultibahasa dan identitas Orang Cina Indonesia", dalam Jennifer Chusman dan Wang Gungwu, *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991

Liem, Yusu. *Prasangka Terhadap Etnis Cina*, Tanpa Kota dan Penerbit, 1998.

B. Makalah dan Jurnal
Sural kabar Djawa Baroe edisi Januari 1943, Perdjalan Okazaki Goenseikan oentok menjelidiki Sekolah-sekolah.

Didi Kwartanada, *Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945*, Yogyakarta: Kanisius. 1996
Dukut Imam Widodo, *Soerabaia Tempo Doeloe Jilid II*, Surabaya: Dinas Pariwisata, 2002

Gotschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982
Hari Poerwanto, *Orang Cina Khek dari Singkawang*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2005

Heidhues, Mery F. Somers, "Kewarganegaraan dan Identitas: Etnis Cina dan Revolusi Indonesia", dalam Jennifer Chusman & Wang Gungwu, *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999

Lapian, A. B., *Di Bawah Pendudukan Jepang*, Jakarta: Penerbitan Sejarah Lisan, No.4, arnas RI, 1966.

Legge, John, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan; Peranan Kelompok Sjahrir*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993

Masri, Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1983

Nio Joe Lan, *Dalem Tawanan Djepang (Boekit Doeri-Serang-Tjimahi) Penoetoeran Penghidoepan Interneeran pada Djeman Pendoedoekan Djepang*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008

Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1979

S.G.Suka dan Parulian Donald, *Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Dasa Media, 1993

S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Soemanto, Wasti dan Soeyarno, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983

Suryadinata, Leo. *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta: Grafiti Pers, Juni 1984.

Tan Beng Kok, *Memoar Ang Yan Goan 1894-1984; Tokoh Pers yang Peduli Pembangunan Bangsa*, Jakarta: kerjasama Yayasan Nabil dengan Hasta Mitra, 2009